

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan hidup mengharuskan manusia untuk mengetahui hal-hal penting yang harus dilakukan dalam menjaganya melalui upaya yang disebut dengan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya bersama semua pihak melalui pengembangan kemitraan antara berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat serta masyarakat secara luas. Pengelolaan lingkungan juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan permasalahan atau kerusakan lingkungan yang termasuk didalamnya perubahan iklim.

Perubahan iklim atau *climate change* merupakan proses yang diakibatkan karena kegiatan dan aktivitas manusia serta berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, tahun 2016 tercatat memiliki rekor kebencanaan tertinggi dengan 2.342 peristiwa. Sekitar 92 persen diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh cuaca. Dalam skala nasional, salah satu upaya awal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut KLHK dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggolongkan seluruh desa di Indonesia berdasarkan letak provinsi menjadi beberapa kelompok berskala untuk memberikan gambaran mengenai jumlah desa berdasarkan tingkat kerentanannya

terhadap perubahan iklim. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kerentanan desa terhadap perubahan iklim diukur melalui kemampuan adaptif, rasio keluarga yang menikmati layanan listrik, rasio jumlah penduduk dengan fasilitas pendidikan, rasio jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan, jenis permukaan infrastruktur jalan, Indikator Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), rasio keluarga yang tinggal di bantaran sungai, rasio bangunan pemukiman di bantaran sungai, jenis sumber air minum, tingkat kemiskinan, serta jenis sumber penghasilan utama

Tabel 1.1.

Situasi kerentanan terhadap perubahan Iklim berbasis desa di Indonesia 2018

No.	Provinsi	Jumlah Desa Menurut Tingkat Kerentanan					Total
		1	2	3	4	5	
1	Aceh	632	1.090	4.709	14	67	6.512
2	Bali	93	31	591	0	1	716
3	Banten	374	126	1.042	7	2	1.551
4	Bengkulu	80	190	1.189	18	55	1.532
5	DIY	43	15	380	0	0	438
6	DKI Jakarta	68	3	184	12	0	267
7	Gorontalo	69	39	597	13	18	736
8	Jambi	127	278	1.043	10	93	1.551
9	Jawa Barat	663	118	5.032	115	34	5.962
10	Jawa Tengah	670	149	7.613	122	24	8.578
11	Jawa Timur	1.272	222	6.946	49	13	8.502
12	Kalimantan Barat	74	169	1.423	161	282	2.109
13	Kalimantan Selatan	180	317	1.420	23	68	2.008
14	Kalimantan Tengah	58	273	1.009	32	197	1.569
15	Kalimantan Timur	141	176	651	11	47	1.026
16	Kalimantan Utara	44	79	267	23	66	479
17	Kep. Babel	79	1	291	9	1	381
18	Kep. Riau	76	100	233	4	2	415
19	Lampung	115	121	2.285	53	58	2.632
20	Maluku	156	101	706	102	23	1.088
21	Maluku Utara	293	71	751	67	14	1.196

No.	Provinsi	Jumlah Desa Menurut Tingkat Kerentanan					Total
		1	2	3	4	5	
22	NTB	141	135	851	5	9	1.141
23	NTT	150	249	2.522	92	257	3.270
24	Papua	246	111	1.217	3.119	178	4.871
25	Papua Barat	222	61	835	402	47	1.567
26	Riau	196	290	1.244	17	88	1.835
27	Sulbar	34	155	439	4	16	648
28	Sulawesi Selatan	317	423	2.196	11	83	3.030
29	Sulawesi Tenggara	194	221	1.470	46	55	1.986
30	Sultra	226	217	1.708	51	70	2.272
31	Sulut	258	314	1.235	5	24	1.836
32	Sumatera Barat	128	304	691	0	22	1.145
33	Sumatera Selatan	175	310	2.484	43	225	3.237
34	Sumut	772	626	4.204	241	261	6.104
TOTAL		8.366	7.085	59.458	4.881	2.400	82.190

Sumber : Statistik Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 2018

Keterangan :

1 : Sangat rendah; 2 : Rendah; 3 : Sedang; 4 : Tinggi; 5 : Sangat Tinggi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 4.881 desa di Indonesia memiliki kerentanan sangat tinggi, 2.400 desa memiliki kerentanan tinggi, 59.458 desa dengan tingkat kerentanan sedang, 7.085 dengan tingkat kerentanan rendah, serta 8.366 desa memiliki tingkat kerentanan sangat rendah terhadap perubahan iklim. Berdasarkan tabel 1.1. pula, diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa paling banyak yaitu 8.578 desa dan telah turut serta berupaya memerangi perubahan iklim.

Di Indonesia sendiri, upaya dalam pengendalian iklim dinilai sangat penting terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi rentan terhadap adanya perubahan iklim. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, KLHK berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong kemitraan serta kolaborasi berbagai pihak yang

bertujuan supaya mampu memperkuat kapasitas seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Proklim adalah suatu program pada tingkat lokal yang dilakukan dengan skala nasional. Program ini diiniasi oleh KLHK sebagai bentuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan potensi di sekitar wilayah setempat, proklim bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk turut berkontribusi pada setiap upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan.

Pelaksanaan proklim di berbagai wilayah di Indonesia juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi skala lokal dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional. Proklim juga memanfaatkan potensi pengembangan wilayah di tingkat lokal serta sajiannya dalam bentuk data dan informasi yang menjadi bahan untuk dapat diolah dalam proses formulasi kebijakan, program, kegiatan serta strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Guna mencapai manfaat tersebut, Proklim dilakukan secara bertahap dan dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 1.1.

Target dan Sasaran Pencapaian Proklam di Indonesia



Sumber : Buku Pedoman Proklam KLHK.

Proklam merupakan program yang ditargetkan dalam jangka panjang, hal ini terlihat dari target dan sasaran pencapaian Proklam yang direncanakan hingga Tahun 2030 dan target implementasinya mencapai 10.000 kampung iklim di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun target pencapaian dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah pengembangan di tahun 2012, implementasi di tahun 2017, penguatan komitmen di tahun 2020, Percepatan implementasi di tahun 2025, serta menuju pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution*)¹ di tahun 2030. Hingga tahun

¹Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.
http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf

2018, Indonesia tercatat telah memiliki 2.484 Kampung Iklim, hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah proklamasi tahun 2017 dengan jumlah 1.375 Kampung Iklim dan tersebar hanya di 30 provinsi.

Berdasarkan tabel 1.1. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah desa paling banyak yaitu 8.578 desa dengan klasifikasi sebanyak 24 desa memiliki tingkat kerentanan paling tinggi dan sebanyak 122 desa memiliki kerentanan tinggi. Hal tersebut membuat Provinsi Jateng turut andil dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan mengimplementasikan Proklamasi yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah diketahui telah memiliki 196 kampung iklim. Data mengenai persebaran Kampung Iklim di berbagai provinsi pada tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.2.

Persebaran Kampung Iklim Indonesia 2018

No.	Provinsi	Jumlah Proklamasi
1	Aceh	16
2	Bali	95
3	Banten	23
4	Bengkulu	28
5	DIY	142
6	Jakarta	119
7	Gorontalo	0
8	Jambi	70
9	Jawa Barat	313
10	Jawa Tengah	196
11	Jawa Timur	142
12	Kalimantan Barat	28
13	Kalimantan Selatan	47
14	Kalimantan Tengah	9
15	Kalimantan Timur	28

No.	Provinsi	Jumlah Proklamasi
16	Kalimantan Utara	2
17	Kep. Bangka Belitung	0
18	Kep. Riau	13
19	Lampung	11
20	Maluku	1
21	Maluku Utara	2
22	NTB	45
23	NTT	485
24	Papua	3
25	Papua Barat	3
26	Riau	200
27	Sulawesi Barat	24
28	Sulawesi Selatan	186
29	Sulawesi Tengah	1
30	Sulawesi Tenggara	22
31	Sulawesi Utara	24
32	Sumatera Barat	82
33	Sumatera Selatan	94
34	Sumatera Utara	30
	Total Kampung Iklm	2.484

Sumber : Statistik Ditjen PPI KHLK 2018

Berdasarkan data sebaran lokasi Proklamasi di Indonesia hingga tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat keempat jumlah Proklamasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 196 Proklamasi setelah peringkat pertama ditempati oleh NTT dengan jumlah 485 Proklamasi, dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 313 Proklamasi serta Provinsi Riau dengan jumlah 200 Proklamasi. Jumlah tersebut membuat Proklamasi di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sorotan karena banyaknya jumlah proklamasi akan berbanding lurus dengan strategi kemitraan yang dilakukan beserta kompleksitasnya.

Pada tahun 2019, melalui Sistem Registri Nasional² Tahun 2019 diketahui bahwa jumlah Proklamasi di Provinsi Jawa Tengah bertambah hingga 258 Kampung Iklim yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Kampung Iklim di Jawa Tengah

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Proklamasi
1	Kab. Wonogiri	0
2	Kab. Batang	0
3	Kota Tegal	0
4	Kab. Grobogan	1
5	Kab. Brebes	1
6	Kab. Klaten	2
7	Kab. Temanggung	2
8	Kab. Kebumen	3
9	Kab. Cilacap	3
10	Kab. Demak	3
11	Kab. Blora	3
12	Kab. Rembang	3
13	Kab. Pemasaran	4
14	Kota Magelang	4
15	Kota Surakarta	4
16	Kab. Tegal	5
17	Kab. Banyumas	5
18	Kota Semarang	5
19	Kab. Kendal	7
20	Kab. Pati	7
21	Kab. Sragen	7
22	Kab. Purbalingga	7
23	Kota Salatiga	7
24	Kab. Pekalongan	8
25	Kab. Banjarnegara	9
26	Kab. Purworejo	9
27	Kota Pekalongan	9

² Sistem Registri Nasional (SRN) merupakan sistem pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. (Permen LHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016)

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Proklamasi
28	Kab. Jepara	11
29	Kab. Karanganyar	13
30	Kab. Kudus	15
31	Kab. Magelang	15
32	Kab. Boyolali	18
33	Kab. Semarang	21
34	Kab. Wonosobo	21
35	Kab. Sukoharjo	26
Total Kampung Iklim		258

Sumber : Sistem Registri Nasional 2019

Menurut data tersebut di atas, Kabupaten Semarang memiliki jumlah Kampung Iklim kedua terbanyak setelah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Semarang memiliki 21 Kampung Iklim yang tersebar di 13 Kecamatan dan hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa proklamasi di Kabupaten Semarang menjadi salah satu sorotan Proklamasi di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa telah terdapat kompleksitas keterlibatan aktor pada berbagai kegiatan di bawah payung program kampung iklim. Adapun berikut merupakan data Proklamasi di Kabupaten Semarang berdasarkan kecamatan:

Tabel 1.4.

Proklamasi Kabupaten Semarang per Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Nama Lembaga	Alamat
1.	Ambarawa	Pengelola Kampung Iklim Desa Bejalen, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang	Desa Bejalen
2.		Pengelola Kampung Iklim Kel. Kupang Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.	Kelurahan Kupang

No	Kecamatan	Nama Lembaga	Alamat
3.	Bancak	Pengelola Kampung Iklim Desa Bancak, Kec. Bancak, Kab. Semarang	Desa Bancak
4.		Calon Pengelola Kampung Iklim Desa Pocung, Kec. Bancak, Kab. Semarang	Desa Pocung
5.	Bandungan	Pengelola Kampung Iklim Desa Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.	Desa Sidomukti
6.	Bergas	Pengelola Kampung Iklim Desa Bergas Kidul, Kec. Bergas, Kab. Semarang	Desa Bergas Kidul
7.		Pengelola Kampung Iklim Kel. Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang	Kelurahan Wujil
8.		Pengelola Kampung Iklim Kel. Ngempon, Kec. Bergas, Kab. Semarang	Kelurahan Ngempon
9.	Bringin	Calon Pengelola Kampung Iklim Desa Rembes, Kec. Bringin, Kab. Semarang.	Desa Rembes
10.	Getasan	Pengelola Kampung Iklim Desa Batur, Kec. Getasan, Kab. Semarang	Desa Batur
11.		Pengelola Kampung Iklim Desa Jetak, Kec. Getasan, Kab. Semarang.	Desa Jetak
12.	Pringapus	Pengelola Kampung Iklim Desa Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang	Desa Pringsari
13.		Pengelola Kampung Iklim Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.	Desa Jatirunggo
14.		Pengelola Kampung Iklim Desa Kemasari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.	Desa Klepu
15.	Sumowono	Pengelola Kampung Iklim Desa Piyanggang, Kec. Sumowono, Kab. Semarang.	Desa Piyanggang

No	Kecamatan	Nama Lembaga	Alamat
16.	Suruh	Pengelola Kampung Iklim Desa Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang	Desa Reksosari
17.	Tengaran	Pengelola Kampung Iklim Desa Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang	Desa Tegalwaton
18.	Tuntang	Pengelola Kampung Iklim Desa Sraten, Kec. Tuntang, Kab. Semarang	Desa Sraten
19.	Ungaran Barat	Pengelola Kampung Iklim Desa Lerep, Kec. Ungaran barat, Kab. Semarang	Desa Lerep
20.	Ungaran Timur	Pengelola Kampung Iklim Kel. Gedanganak RW IV, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.	Kelurahan Gedanganak
21.		Pengelola Kampung Iklim Kel. Gedanganak RW VIII, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.	Kelurahan Gedanganak

Sumber : Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Semarang
(*KAMPUNG IKLIM: Kampung Iklim per Kecamatan, n.d.*)

Berdasarkan tabel 1.4., diketahui bahwa terdapat 21 kampung iklim yang dirintis dan tersebar di tiga belas kecamatan di Kabupaten Semarang. Namun begitu, mayoritas kampung iklim tersebut masih berstatus rintisan dan belum memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap verifikasi. Berdasarkan pernyataan dari pegawai DLHK Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa salah satu di antara kedua puluh satu kampung iklim yang telah memasuki tahap verifikasi adalah proklamasi yang dilaksanakan di Dusun Soka atau Proklamasi Sokaku Asri. Hal ini menunjukkan bahwa Proklamasi Sokaku Asri telah memiliki implementasi keterlibatan beberapa aktor sebagai pemangku kepentingan.

Secara umum, pelaksanaan Program Kampung Iklim di Indonesia telah melibatkan beberapa aktor kepentingan. Berdasarkan laporan kinerja Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK disebutkan bahwa pelaksanaan proklam telah dibersamai dengan implementasi fungsi sinergisitas, integrasi, koordinasi serta *leadership*. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor pemberdayaan tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat semata, tetapi juga aktor dari klasifikasi lain seperti pemerintah dari berbagai lini, lembaga swadaya masyarakat, sektor privat, masyarakat,, kelompok masyarakat hingga lembaga pers. Strategi tersebut juga sekaligus mendorong upaya keberhasilan pemberdayaan dengan menunjukkan bahwa siapa aktor atau pelaku dari setiap proklam dan pengaruh yang diberikan menjadi bagian dari penentu keberhasilannya. Selain itu, telah dilakukan pula proses *monitoring*, evaluasi serta verifikasi dari setiap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pada Program Kampung Iklim.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, disebutkan bahwa komponen adaptasi perubahan iklim meliputi pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, pengendalian penyakit terkait iklim, serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Sementara komponen mitigasi perubahan iklim meliputi Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan

penghematan energi, penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK, peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK. Seluruh usaha tersebut kemudian diwujudkan melalui konsep jejaring kebijakan yang memetakan peran aktor dalam suatu kebijakan dan program.

Berdasarkan panduan Strategi Pelaksanaan Proklim di Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah menerapkannya melalui pengembangan kemitraan pada pelaksanaan program kampung iklim yang memiliki sinergisitas antar *stakeholders*, diantaranya meliputi akademisi, media massa, pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta LSM. Secara lebih spesifik, salah satu contoh daerah yang telah mengimplementasikan konsep jejaring kebijakan dalam Program Kampung Iklim adalah Kabupaten Semarang yang memiliki 21 Kampung Iklim sehingga membuat Kabupaten Semarang berada di tingkat kedua dengan ProKlim terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sekaligus membuat proses kerjasama antar *stakeholder* dapat dikatakan semakin kompleks. Di Kabupaten Semarang sendiri, salah satu Proklim yang menjadi sorotan adalah Proklim Sokaku Asri, Desa Lerep yang telah memasuki tahap verifikasi, Proklim Sokaku Asri memiliki upaya adaptasi berupa pengendalian banjir melalui pembuatan biopori dan panen air hujan serta peningkatan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman penunjang kehidupan, dan upaya mitigasi berupa pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. Namun begitu, penelitian ini hanya menyoroti kegiatan pengelolaan sampah karena kegiatan tersebut merupakan sorotan

dari keberadaan Proklamasi Sokaku Asri melalui keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Sokaku Asri, Bank Sampah Soka Resik serta upaya daur ulang yang terjadi di dalamnya. Meski telah menjadi sorotan, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya muncul berbagai macam kendala yang terjadi. Kendala tersebut muncul dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga pemantauan program.

Kendala pertama yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait permasalahan perubahan iklim. Padahal, pengetahuan masyarakat mengenai analisis masalah perubahan iklim serta upaya Proklamasi melalui kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka seharusnya menjadi pokok dasar keberhasilan Proklamasi di daerah tersebut. Masalah ini disebabkan karena sosialisasi tidak dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya beberapa tokoh penanggungjawab seperti Ketua RW atau beberapa perwakilan saja dan informasi cenderung terhenti atau tidak tersalurkan kepada masyarakat. Padahal, proses penyampaian informasi menjadi hal penting bagi pelaksanaan Proklamasi di setiap daerah termasuk di Dusun Soka. Hal lain yang menjadi pemicu kurangnya pengetahuan masyarakat adalah karena istilah dalam Proklamasi yang sulit dan tidak familiar di kalangan masyarakat seperti istilah adaptasi dan mitigasi. Masyarakat cenderung lebih memahami aksi-aksi yang dilakukan secara konkrit. Selain itu, masyarakat juga perlu pengetahuan terkait potensi dan daya tarik setiap wilayah, sehingga keberhasilan Proklamasi tidak hanya dinilai dari segi kuantitas namun juga kualitas yang dapat menghasilkan manfaat maksimal.

Permasalahan lain juga timbul karena meskipun Proklam telah berjalan, namun banyak pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat terkait keberlanjutan Program Kampung Iklim di wilayah masing-masing terutama di Dusun Soka dalam jangka panjang. Pasalnya, permasalahan perubahan iklim bukan merupakan isu yang hanya terjadi di lingkup lokal, melainkan global. Permasalahan ini tidak dapat diabaikan karena akan memicu kampung iklim yang terabaikan dan terbengkalai sebagai dampak dari ketidaktahuan masyarakat terkait arah keberjalanan kampung iklim yang dilaksanakan.

Salah satu *stakeholder* utama proklam adalah masyarakat karena masyarakat akan turun langsung sebagai implementor program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi geografis dan topografi wilayah. Namun begitu, pengetahuan masyarakat Dusun Soka hanya sebatas kewajiban dan perubahan budaya dalam menjaga kebersihan lingkungan serta tidak sepenuhnya memahami pentingnya upaya adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Sebaliknya, seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat justru menyumbangkan gas rumah kaca yang tergolong tinggi setiap tahunnya melalui kegiatan di bidang pertanian, transportasi, perumahan, pengolahan limbah dan air limbah, serta beberapa kegiatan rutin lainnya.

Kendala selanjutnya berkaitan dengan proses evaluasi serta *monitoring* program dan kegiatan. Dalam melaksanakan program yang merupakan turunan dari kebijakan, dibutuhkan alur runtut yang diawali dengan formulasi hingga evaluasi. Namun begitu, beberapa proklam yang sudah terlaksana diketahui tidak menerapkan evaluasi maupun *monitoring* program secara berkala, termasuk Proklam yang

dilaksanakan di Dusun Soka. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Muliani Putri (2019) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kategori proses Proklamasi beserta tingkat partisipasi masyarakat Dusun Soka, pada kategori kategori tersebut diketahui sebanyak 37,7% (tiga puluh tujuh persen) pada pengambilan keputusan, 52,46% (lima puluh dua koma empat puluh enam persen) pelaksanaan, 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dalam proses pengambilan manfaat, serta 34,43% (tiga puluh empat koma empat puluh tiga persen) evaluasi. (I. M. Putri, 2019). Rendahnya partisipasi dalam evaluasi menjadi salah satu masalah, pasalnya evaluasi perlu dilakukan untuk mengamati perkembangan perencanaan dan pelaksanaan Proklamasi di daerah, mengetahui kekurangan dan permasalahan dalam implementasi proklamasi baik secara detail serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk merumuskan tindakan antisipatif dan korektif. Selain itu, melalui pemantauan dan evaluasi diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Proklamasi dapat lebih ditingkatkan (I. M. Putri, 2019).

Kendala keempat adalah kurangnya keterlibatan peran dari kelompok aktor akademisi. Pemprov Jawa Tengah melalui dokumen Strategi Pelaksanaan Program Kampung Iklim menyebutkan bahwa terdapat keterlibatan akademisi sebagai salah satu pemangku kepentingan pada implementasi proklamasi. Namun begitu, belum tampak secara jelas keterlibatan akademisi terhadap Proklamasi yang dilihat melalui masih sangat sedikitnya program kolaborasi seperti melalui KKN sebagai upaya pengabdian maupun penelitian terkait Proklamasi baik dari segi saintis maupun humaniora.

Kendala lain juga disebabkan karena publikasi yang masih minim. Salah satu upaya penyebaran informasi mengenai pelaksanaan Program Kampung Iklim adalah melalui publikasi secara berkala di sosial media. Namun begitu, pemanfaatan media yang dikelola oleh pihak pengurus Proklam Sokaku Asri belum berjalan dengan baik sehingga belum banyak informasi pelaksanaan Proklam Sokaku yang disebarkan kepada publik. Informasi mengenai Proklam Dusun Ssoka termasuk pada pengelolaan sampah di wilayah setempat masih jarang ditemukan.

Kendala terakhir berkaitan dengan kurangnya sumber daya dalam proses pengisian Sistem Registri Nasional yang selanjutnya disebut SRN. Dalam proses pengisian SRN, seringkali pelaksanaannya dinilai kurang maksimal karena data yang perlu diisi bersifat rigid dan detail, sehingga pihak penanggungjawab proklam hanya dapat mengisi data tersebut secara general dan seringkali melupakan bukti dokumentasi.

Upaya pengendalian perubahan iklim sendiri pada dasarnya dilaksanakan secara global dan dapat dikatakan sebagai agenda prioritas dunia. Dalam lingkup internasional, hal ini disebutkan dalam Perjanjian Paris atau kesepakatan global dalam rangka menghadapi persoalan *climate change*. Berbagai negara telah berkomitmen dan menyatakannya melalui *Nationally Determined Contribution* yang akan diimplementasikan di masing-masing negara pada periode 2020-2030, beserta aksi yang dilakukan pada pra-2020. Perjanjian Paris didukung oleh seratus sembilan puluh lima negara dengan rincian sebanyak seratus tujuh puluh satu negara menandatangani

perjanjian, sementara tiga belas negara melaksanakan deposit instrumen ratifikasi (Murdaningsih, 2016). Selain Perjanjian Paris, terdapat pula *Sustainable Development Goals* point 13 yang berisi aksi untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Proklamasi memiliki payung hukum dalam lingkup nasional berupa Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Untuk memberikan arahan lebih lanjut yang bersifat teknis kepada seluruh aktor berkepentingan yang terlibat dalam program kampung iklim, Dirjen PPI lalu menerbitkan regulasi berupa Peraturan Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Di lingkup lokal sendiri, terdapat produk hukum berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Program Terpadu Kampung Iklim, 2016 serta Surat Edaran Gubernur Jateng No.860.1/0019785 Tentang Sinkronisasi Dan Harmonisasi Gerakan Pengendalian Perubahan Iklim dengan prioritas lokasi pada wilayah rawan bencana dan obyek pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah.

Beerdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat berbagai macam aktor pemberdayaan pada kegiatan pengelolaan sampah Proklamasi Sokaku Asri yang keterlibatannya mendukung ketercapaian tujuan pemberdayaan tersebut. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran sesuai tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana konsep jejaring kebijakan digunakan dalam

keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah sebagai bentuk pelaksanaan Program Kampung Iklim Sokaku Asri?

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan konsep jejaring kebijakan dalam Program Kampung Iklim, namun begitu pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peran aktor timbul pada pelaksanaan Program Kampung Iklim termasuk pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka, meliputi:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait analisis permasalahan wilayah sehingga menciptakan kejenuhan yang terjadi dalam proses pengelolaan sampah
- b. Munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai keberlanjutan arah gerak setelah pengusulan dan implementasi proklamasi berjalan
- c. Kegiatan evaluasi dan pemantauan yang sering dilewatkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pada proklamasi
- d. Peran akademisi yang belum tampak secara jelas
- e. Media promosi yang belum berjalan dengan baik seperti proklamasi wilayah lain
- f. Pengisian Sistem Registri Nasional yang dianggap rumit serta SDM yang kurang.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lahirlah rumusan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Apa peran setiap *stakeholder* dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklam) Sokaku Asri?
- b. Bagaimana jejaring *stakeholder* dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklam) Sokaku Asri?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi peran setiap *stakeholder* dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklam) Sokaku Asri.
- b. Menganalisis jejaring *stakeholder* dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklam) Sokaku Asri.

1.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian mengenai penerapan konsep jejaring kebijakan dalam kegiatan pengelolaan sampah Program Kampung Iklim di Dusun Soka ini dapat memberikan beberapa kegunaan baik secara ilmiah maupun praktis, meliputi:

1.4.1. Kegunaan Ilmiah

Suryana (2010) menyatakan bahwa kegunaan ilmiah merupakan kegunaan untuk memberi kontribusi kepada perkembangan pengetahuan dengan relevansi bidang studi yang dipelajari.

Kegunaan ilmiah dalam penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya pengetahuan tentang teori jejaring aktor.
- b. Memperkaya ilmu dan kepustakaan tentang Program Kampung Iklim.
- c. Memperkaya ilmu tentang jejaring aktor dalam Program Kampung Iklim.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Suryana (2010) menyatakan bahwa kegunaan praktis adalah kegunaan sebagai kontribusi bagi dunia praktis di lapangan. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah pengalaman serta wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam menulis.

b. Bagi seluruh *Stakeholders* terkait.

Kegunaan penelitian ini bagi para aktor terkait adalah untuk memperbaiki upaya yang masih belum optimal dalam proses kerjasama antar aktor sesuai kepentingan masing-masing tanpa abai dengan tujuan pelaksanaan Proklamasi Sokaku Asri

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti dalam mencari perbandingan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya, serta membuktikan orisinalitas dari suatu penelitian. Penelitian ini didasari atas beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai jejaring kebijakan serta Program Kampung Iklim sebagai solusi dari dampak dari perubahan iklim. Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan untuk memperkaya bahan kajian guna melengkapi riset terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Seluruh penelitian mengungkapkan hal yang sama bahwa implementasi suatu program tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai pelaksana serta penerima program. Namun tidak dapat dipungkiri

juga bahwa terdapat aktor-aktor lain yang dapat membantu keberlangsungan program tersebut baik sebagai aktor yang mempengaruhi atau aktor yang dipengaruhi.

1. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Fitri Handayani dan Hardi Warsono pada tahun 2017 dengan judul Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di pantai Karang Jahe, faktor-faktor penghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata pantai Karang Jahe, serta merumuskan strategi penyelesaian faktor penghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Pantai Karang Jahe melibatkan peran masyarakat setempat, pengusaha dan Dinbudparpora. Ketiganya memiliki masing-masing peran termasuk dalam membuat kebijakan, sebagai koordinator, fasilitator, eksekutor hingga akselerator. Faktor penghambat para *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata ini adalah lahan, sumber daya manusia, serta anggaran yang terbatas, regulasi, pola pikir, promosi atau *branding*, serta kerja sama di antara para *stakeholders* yang terlibat. Upaya yang digunakan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah membentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan para pengelola Pantai Karang, membentuk kelompok kesadaran pariwisata atau pokdarwis, melakukan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara memanfaatkan limbah menjadi produk yang dapat dijual, memberi sanksi sebagaimana telah diatur dalam hal pengembangan pariwisata berbasis bisnis,

melakukan pembaharuan pada situs resmi atau web Dinbudparpora sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan objek wisata Pantai Karang Jahe. (Handayani, 2017)

2. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yumna Ghina (2017) dengan judul Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat gambaran dalam proses pemberdayaan masyarakat dan peran seorang aktor, modal sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proklam di suatu Kampung Iklim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampung Sambirejo memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tertinggi. Namun begitu, saat ini Program Kampung Iklim tidak lagi diterapkan oleh masyarakat di Kampung Sambirejo. Hal tersebut disebabkan karena pemikiran di kalangan masyarakat bahwa proklam adalah kegiatan milik pemerintah sehingga dipandang sebagai program elitis daripada program milik warga setempat. (Ghina, 2017).

3. Penelitian terdahulu ketiga berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung iklim di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Ika Muliani Putri pada tahun 2019 . tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Proklam Sokaku Asri beserta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proklam Sokaku Asri dimulai sejak 2017 dan masih berjalan hingga saat ini. Beberapa aspek kegiatan yang dilakukan meliputi

peningkatan ketahanan pangan, pengendalian banjir, serta pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. Dari delapan dusun di Desa Lerep, Dusun Soka adalah satu-satunya dusun yang telah mengimplementasikan proklamasi, hal ini disebabkan karena ketujuh dusun sisanya memiliki daya tarik tersendiri dan berbeda satu sama lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada proklamasi, yaitu sebanyak 37,7% pengambilan keputusan, 52,46% pelaksanaan, 57,38% dalam proses pengambilan manfaat, serta 34,43% evaluasi. (I. M. Putri, 2019).

4. Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Deby Febiola Putri pada tahun 2018 dengan judul *Analisa stakeholder* dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keterlibatan para aktor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Penelitian ini menunjukkan ketidakberhasilan upaya Pemkot Madiun dalam rangka menekan angka kemiskinan yang disebabkan karena ketidaktercapaian target sebagaimana telah direncanakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari kebijakan ini adalah komunikasi serta kerjasama yang baik antara aktor yang bersangkutan atau berkepentingan dalam kebijakan terkait. (D. F. Putri, 2018).

5. Penelitian terdahulu kelima berjudul *Model Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang yang dilakukan oleh Tri Yuniningsih, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model jejaring aktor *pentahelix* dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan masalah bahwa kerjasama antar aktor yang berkepentingan masih kurang optimal. Penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan aktor pemerintah, sektor privat, akademisi, media massa, beserta komunitas. Namun begitu, temuan lapangan menunjukkan belum optimalnya Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang, serta belum optimalnya kerjasama antar stakeholders yang bersangkutan. (Yuniningsih, 2019).

6. Penelitian terdahulu kelima dilakukan oleh Dodi Faedlulloh, Bambang Irawan, dan Retnayu Prasetyanti pada tahun 2019 dengan judul Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pelaksanaan Program Unggulan Iklim Kampung (ProKlim) berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Jati, Jakarta Timur dan Desa Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proklim di kedua wilayah tersebut menekankan aspek pemberdayaan masyarakat terutama dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun begitu, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat di Desa Jati dinilai tidak dikelola dengan baik, sedangkan pelaksanaan proklim di Desa Kebon Kosong bersifat lebih runtut dan berkelanjutan. Meski begitu, secara substansi ProKlim di kedua wilayah tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Lebih jauh dalam praktiknya, Proklim dengan pengelolaan yang gigih dinilai mampu mengelola iklim mikro yang berdampak lebih luas terhadap penurunan suhu di DKI Jakarta. (Faedlulloh, 2019).

7. Penelitian terdahulu keenam dilakukan oleh Reza Rinaldy, Soni A. Nulhaqim dan Arie Surya Gutama pada tahun 2017 dengan judul Proses *Community Development* pada Proklim di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (Studi Kasus

Program Bank Sampah dalam Program Kampung Iklim). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses *community development* yang terdiri tahapan *engagement*, *assessment*, perencanaan program, pemformulasian rencana aksi, implementasi, evaluasi dan hasil perubahan, serta tahapan terminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan teknik penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi non partisipasi, studi kepustakaan serta studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketujuh tahapan proses *community development*, hanya terdapat 5 tahap yang telah dilakukan dan berjalan sebagaimana mestinya, Kelima tahapan tersebut meliputi *engagement*, *assessment*, perencanaan program, implementasi, serta terminasi. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan adanya kendala pemasaran produk dan manajemen organisasi, terutama dalam SDM sebagai pelaksana kegiatan. (Rinaldy, 2017).

8. Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Azika Putri Aidila pada tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program Desa Iklim serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim di wilayah tersebut belum berjalan secara maksimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya meliputi kapabilitas organisasi, informasi dan dukungan (Aidila, 2018).

9. Penelitian terdahulu kesembilan dilakukan oleh pada tahun 2019 oleh Atur Ekharisma Dewi, Maryono, dan Budi Warsito dengan judul Implementasi Program Kampung Iklim di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pencapaian keberlanjutan Proklamasi di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kampung iklim memberi pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat, di mana melalui proses menanam tanaman dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pengelolaan sampah dengan konsep 3R yang dilakukan oleh Bank Sampah serta berbagai produk inovatif yang dihasilkan warga juga mampu menambah penghasilan tambahan. Proklamasi juga mendukung kearifan lokal meski letaknya berada di perkotaan dengan sekaligus memaksimalkan lahan rumah pekarangan untuk menanam, beternak dan memproduksi pangan lokal serta produk kerajinan yang inovatif (Dewi, 2019).

10. Penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Windiany Putri Effendy dan Indah Prabawati dengan judul Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Organik Menggunakan *Black Soldier Fly* (BSF) di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan Kota Surabaya. Hasil penelitian evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan, yaitu: 1) sumber daya aparatur, bahwa tidak terdapat uraian tugas bagi setiap petugas, 2) kelembagaan, yang ditunjukkan dengan koordinasi lancar, diskresi yang fleksibel, pola kepemimpinan yang demokratis, dan sinergitas telah berjalan baik, 3) sarana, prasarana, dan teknologi, dimana ketiga aspek tersebut telah cukup

menunjang pelaksanaan program, 4) finansial, melalui dukungan finansial yang berasal dari DKRTH Kota Surabaya yang dapat memenuhi biaya pelaksanaan program, 5) regulasi, program ini hanya memiliki SOP sebagai panduan pelaksanaan dan tidak memiliki peraturan spesifik program. (Effendy, 2020).

Berdasarkan kesepuluh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana terlampir di atas, penulis tidak menemukan kesamaan fokus dan lokus penelitian. Beberapa perbedaan meliputi penelitian terdahulu yang hanya fokus kepada pengelolaan dan satu *stakeholder* yaitu masyarakat, fokus yang terletak pada jejaring kebijakan di sektor pariwisata, dan perbedaan teori, model hingga teknik pemetaan *stakeholders* yang digunakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.5.2. Administrasi Publik

Rosenbloom dan Deborah Goldman (dalam Ibrahim, 2009) mengartikan Administrasi publik sebagai upaya penggunaan teori dan proses manajerial, hukum, serta politik dalam rangka memenuhi mandat eksekutif, legislative, serta yudikatif untuk menyediakan pelayanan dan pengaturan bagi publik secara keseluruhan atau hanya bagi beberapa segmen.

Woodrow Wilson (dalam Indiahono, 2009) menyatakan “*this is why there would be a science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its organization, and to crown its dutifulness. This is one reason why the is such a science.*” Pada pernyataan tersebut Wilson menginginkan supaya

kajian tentang administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan masalah seputar personalia yang lazim dikaji di masanya, tetapi juga organisasi dan manajemen secara umum. Organisasi dan metode dari pemerintah merupakan ide penting dari pendapatnya. Ia menyatakan bahwa ada tugas utama administrasi publik. Pertama, apa saja yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dengan baik, dan kedua bagaimana upaya atau kegiatan itu dilakukan secara baik dengan efisiensi yang paling memungkinkan dan pada paling sedikit biaya yang mungkin dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun energi.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, disimpulkan bahwa administrasi publik ialah proses penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas proses formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan publik dan pada mekanisme serta pelaksanaannya melibatkan kerja serta dukungan sumber daya manusia dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi..

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Henry (1988) menguraikan lima paradigma administrasi publik, di antaranya meliputi:

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow pada bukunya menjelaskan bahwa terdapat dua buah fungsi negara, meliputi administrasi dan politik dimana politik berhubungan dengan kebijakan dari kehendak negara, sementara administrasi berhubungan dengan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pada paradigman ini, penekanan terdapat pada lokus yang berarti letak

administrasi publik seharusnya. Goodnow juga berpendapat bahwa administrasi publik seharusnya berada di birokrasi pemerintah tanpa mempersoalkan fokusnya.

2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Berbeda dengan paradigma pertama, paradigma kedua memberikan penekanan pada focus dari administrasi publik, yaitu keahlian esensial berupa berbagai prinsip administrasi. Pada paradigma ini pula, lokus dari administrasi publik tidak dipersoalkan karena adanya anggapan bahwa prinsi administrasi publik berlaku pada seluruh *administration setting* baik dalam sektor privat maupun publik tanpa memandang batas kultural. Terdapat tujuh prinsip administrasi sebagaimana disebutkan diatas yang diajukan oleh Gulick dan Urwick , meliputi POSDCoRB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

3) Paradigma 3 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ketiga muncul akibat banyaknya kritikan yang dituai pada paradigma kedua. Berangkat dari hal tersebut, administrasi publik lalu kembali kepada disiplin induknya, yaitu ilmu atau studi politik. Pada paradigma ketiga, terdapat pembaharuan pengertian terkait lokus yakni pada birokrasi pemerintah, akan tetapi paradigma ketiga melepaskan focus sebagai bagian darinya. Periode pada paradigma ketiga dianggap sebagai upaya peninjauan ulang seluruh konseptual yang berada di antara politik dan administrasi publik. Selain itu, studi administrasi publik menjadi kental dengan tidak adanya kerangka kerja yang bersifat intelektual.

4) Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Pada paradigma keempat, para tokoh administrasi publik menemukan sebuah alternatif yang akan menjadikan administrasi publik sebagai sebuah keilmuan dimana pilihan manajemen menjadi salah satu alternatif potensial bagi mayoritas para lulusan administrasi publik. Sebagai sebuah paradigma, manajemen hanya menyediakan focus tanpa lokus. Dalam arti lain, manajemen hanya menyediakan Teknik-teknik yang memerlukan spesialisasi tapi tidak mengidentifikasi setting kelembagaan atau keahlian yang harus diterapkan.

5) Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Kemunculan paradigma kelima pada tahun ditandai dengan pembentukan *The National Association of Schools of Public Affairs and Administration* pada tahun 1970. Pembentukan NASPAA menjadi tanda mulai berkembangnya studi administrasi publik dan mendukung kepercayaan bidang studi tersebut. Pembentukan NASPAA juga berdampak pada pengakuan administrasi publik sebagai bidang studi yang berdiri sendiri sebagai suatu bidang ilmu yang memiliki lokus permasalahan pada publik dan focus pada manajemen dan kebijakan publik, teori keorganisasian, serta ekonomi politik.

6) Paradigma 6 : *Governance*

Governance menjadi paradigma keenam administrasi publik yang dimaknai sebagai sebuah sistem nilai, kebijakan, serta kelembagaan dimana mencakup

pengelolaan seluruh urusan yang berhubungan dengan politik, ekonomi, dan sosial. Pada paradigma ini, pengelolaan dilakukan melalui interaksi yang terjadi antara tiga pihak meliputi masyarakat, pemerintah, dan sektor privat atau bisnis. Paradigma *governance* memberikan penekanan pada proses dimana para masyarakat sebagai warga negara dan kelompok dapat memperjuangkan setiap kepentingannya, menyediakan mediasi bagi berbagai perbedaan yang muncul, serta menjalankan hak dan kewajibannya. Esensi yang diperoleh dari paradigma *governance* adalah interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat yang semakin kuat dalam mengimplementasikan serta membuat *branding* terkait *people-centered development* (Keban, 2014).

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma keenam, atau paradigma *governance* karena pada paradigma ini terdapat hubungan atau interaksi antar aktor, terutama pemerintah, masyarakat serta sektor privat dalam rangka mendukung upaya *people center development*.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki arti yang luas dan bersifat multi-interpretasi. James Anderson (dalam Subarsono, 2011) memberi makna kebijakan publik sebagai keputusan yang telah ditetapkan oleh badan serta aparat pemerintah. Meski begitu, pada kenyataannya berbagai faktor serta aktor dari luar pemerintah dapat turut mempengaruhi suatu kebijakan publik.

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2011) mengartikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Banyak anggapan menilai bahwa konsep tersebut masih sangat luas karena pada dasarnya kebijakan publik juga meliputi segala hal yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah saat menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi. Dunn (dalam Subarsono : 2011) menggambarkan proses kebijakan publik melalui gambah berikut:

Gambar 1.2.

Proses Kebijakan Publik.

Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda)
<i>Forecasting</i> (Formulasi Kebijakan)
Rekomendasi Kebijakan (Adopsi Kebijakan)
Implementasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan (Penilaian Kebijakan)

Sumber : Willian Dunn (dalam Subarsono, 2011)

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) beranggapan bahwa kebijakan publik ialah sebuah intervensi kontinum yang dilakukan oleh aktor dari birokrasi atau pemerintahan demi kepentingan publik atau warga negara yang tidak atau kurang berdaya agar mereka dapat melangsungkan kehidupan serta turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Peterson (dalam Keban, 2014) berpendapat bahwa kebijakan publik secara garis besar tampak sebagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan publik, dengan memberi fokus perhatian kepada “siapa

mendapat apa, kapan dan bagaimana.” Islamy (dalam Anggara, 2014) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diputuskan atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah demi ketercapaian tujuan tertentu berupa kepentingan warga negara. Terdapat empat definisi kebijakan publik lain, di antaranya meliputi: 1) Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah, 2) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, namun harus dilaksanakan dalam bentuk nyata, 3) Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, 4) Kebijakan publik harus berorientasi pada tujuan utama, yaitu kepentingan seluruh warga negara.

Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai pilihan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka membuat keputusan untuk tujuan utama penyelesaian permasalahan publik yang terjadi serta berorientasi pada kepentingan seluruh warga negara.

1.5.5. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut Thomas R. Dye (dalam Kadji, 2015: 26) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengintervensi kehidupan publik sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan publik yang terjadi di masyarakat. Intervensi tersebut bisa bersifat memaksa publik, hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat otoritatif. Selain itu, formulasi kebijakan juga disebut sebagai sebuah tahap awal yang menentukan suatu kebijakan publik karena pada proses ini dilakukan perumusan dari berbagai batas kebijakan itu sendiri (Kadji, 2015).

Woll (dalam Herabudin, 2016) mendefinisikan formulasi kebijakan sebagai pengembangan suatu mekanisme dalam rangka penyelesaian berbagai macam masalah publik yang kemudian menuntut analisis kebijakan untuk mengimplementasikan berbagai teknik untuk menjustifikasi bahwa terdapat satu buah pilihan kebijakan dimana kebijakan tersebut adalah sebuah pilihan yang paling baik di antara kebijakan yang lain. Tjokroamidjodo (dalam Herabudin, 2016: 70) menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah rangkaian tindakan memilih salah satu di antara berbagai pilihan yang dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah proses pembuatan keputusan.

Berkaitan dengan itu, Widodo (dalam Herabudin, 2016: 70) menyatakan bahwa saat proses pembuatan kebijakan tidak dilakukan secara komprehensif dan tepat, maka hasil kebijakan tidak akan mampu mencapai tataran optimal. Artinya, suatu kebijakan bisa saja tidak dapat diimplementasikan. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya mencapai tujuan serta sasaran dari suatu kebijakan dan berdampak tidak dapat dipecahkannya masalah publik. Padahal, kebijakan publik diformulasikan sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan public di masyarakat.

Berdasarkan beberapa deifinisi tersebut, disimpulkan bahwa formulasi kebijakan ialah proses dimana para aktor kebijakan publik memiliki intervensi terhadap permasalahan publik serta proses pemilihan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam suatu masalah dan dibuat untuk menyelesaikan masalah publik.

1.5.6. Aktor Kebijakan

Howlett dan Ramesh (Anggara, 2014) menyatakan bahwa berbagai aktor yang memiliki pengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah aktor eksekutif dan legislatif yang terpilih melalui proses pemilu, birokrat, kelompok yang berkepentingan, organisasi peneliti, serta media massa. Selain kelima aktor tersebut, terdapat pula beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik, meliputi struktur birokrasi, organisasi negara, sektor bisnis, serta organisasi masyarakat.

Moore (Anggara, 2014) menyatakan bahwa secara umum aktor kebijakan adalah aktor yang memiliki keterlibatan dalam proses formulasi kebijakan publik meliputi aktor dari ranah pemerintah, sektor bisnis, serta masyarakat. Keterlibatan ketiga aktor tersebut memiliki peran yang sangat kuat dalam proses formulasi kebijakan publik.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, disimpulkan bahwa aktor kebijakan adalah aktor yang memiliki keterlibatan dalam perumusan atau penyusunan suatu kebijakan publik. Aktor kebijakan dapat berasal dari berbagai klasifikasi aktor baik dari sektor privat, masyarakat atau pemerinta.

1.5.7. Analisis Stakeholders Mapping

Menurut WHO (dalam LAN RI, 2015) pemetaan atau analisis *stakeholder* merupakan suatu teknik yang digunakan sebagai upaya mengidentifikasi serta menilai setiap kepentingan dari aktor yang bersangkutan meliputi kelompok, pihak utama, serta institusi yang dapat memberi pengaruh terhadap keberhasilan dari suatu kebijakan,

program hingga kegiatan. Pemetaan atau analisis *stakeholder* akan menghasilkan informasi terkait siapa aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi, siapa aktor yang belum terlibat dan harus dilibatkan, serta kapasitas aktor mana yang kapasitasnya perlu ditingkatkan untuk mendongkrak keberhasilan suatu kebijakan atau program.

LAN RI (2015) berpendapat bahwa berbagai teknik pada analisis aktor atau *stakeholder* memiliki relevansi terhadap perencanaan partisipasi *stakeholder*. Selain itu, terdapat pula berbagai teknik *stakeholders mapping* guna mengetahui keterkaitan antar *stakeholders* dalam suatu kebijakan atau program, salah satunya ialah metode atau teknik *net map*.

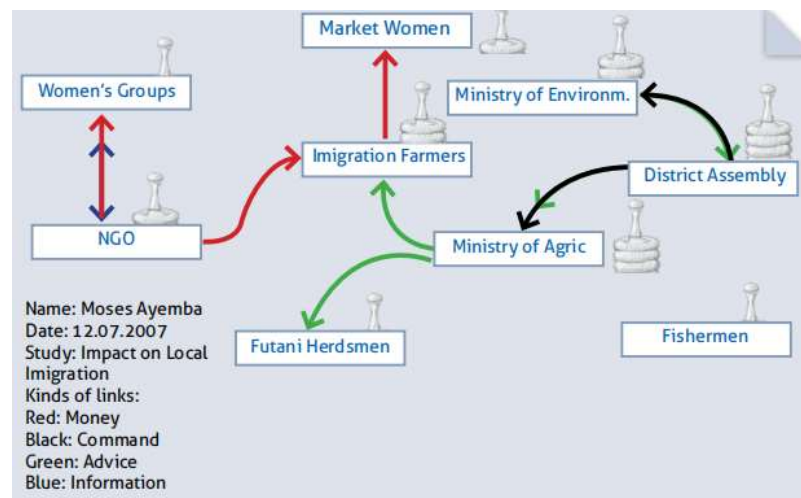
Schiffer (dalam LAN RI, 2015) memperkenalkan *Net map* sebagai alat pemetaan berbasis wawancara yang membantu orang memahami, memvisualisasikan, mendiskusikan dan meningkatkan situasi di mana banyak aktor yang berbeda mempengaruhi hasil..

Schiffer (dalam LAN RI, 2015) juga menjelaskan empat langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis *stakeholders* dengan teknik *net mapping*. Langkah pertama yang dilakukan pada metode *Net Map* adalah dengan membuat pengelompokan jenis aktor baik itu aktor publik, privat, masyarakat, dan lain sebagainya. Setiap kelompok atau klasifikasi aktor yang bersangkutan kemudian diberikan warna yang berbeda satu sama lain. Langkah kedua adalah dengan mendefinisikan hubungan yang dibangun antar satu aktor dengan aktor lain, misal

dalam hal penganggaran, arus perintah, dan lain sebagainya, setiap hubungan ditandai dengan garis yang diberi warna berbeda sesuai dengan bentuk hubungan yang dijalin. Langkah ketiga adalah menjelaskan bentuk pengaruh dengan meletakkan tumpukan pipihan yang ketinggiannya tersebut membentuk suatu menara pengaruh. Ketinggian Menara tersebut menunjukkan besar pengaruh setiap aktor. Langkah terakhir adalah dengan memastikan bahwa seorang analis atau peneliti telah mengetahui siapa saja aktor yang memiliki keterlibatan, bagaimana para aktor tersebut bekerjasama sehingga membentuk berbagai hubungan, serta besaran pengaruh dari setiap aktor yang diketahui melalui pertanyaan yang telah ditentukan dan ditanyakan.

Gambar 1.3.

Skema Analisis Stakeholders Mapping dengan Teknik Net Map



Sumber : Schiffer (dalam LAN RI, 2015)

Berdasarkan langkah yang telah dilakukan tersebut diatas, teknik *stakeholders mapping* dengan pendekatan *net mapping* akan menjelaskan manfaat dalam

menggunakan teknik tersebut, diantaranya adalah 1) mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam program, 2) bagaimana hubungan antar *stakeholders* tersebut, 3) Besar pengaruh dari *stakeholders* tersebut, serta 4) Tujuan setiap *stakeholder*

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis *stakeholders* adalah teknik untuk mengidentifikasi dan memberikan nilai dari setiap kepentingan *stakeholders* dalam suatu program. Teknik *net map* merupakan salah satu teknik pemetaan *stakeholders* dalam suatu kebijakan atau program dengan cara menganalisis setiap aktor yang terlibat beserta perannya, kemudian menghubungkan keterkaitan peran antar *stakeholder* serta mengukur tingkat partisipasi aktor tersebut dalam kebijakan terkait.

1.5.8. Jejaring Kebijakan

Istilah jejaring atau *network* mulai digunakan pada sekitar tahun 1940 sebagai sesuatu untuk membuat analisis serta pemetaan hubungan atau keterikatan. Dalam konteks formulasi kebijakan publik, konsep ini menekankan pada bagaimana kemunculan suatu kebijakan yang berasal dari hubungan antar satu individu tau organisasi dengan individu tau organisasi lainnya. Parson (dalam Anggara, 2014). Selain itu, *network* menurut Dubini dan Aldrich (dalam Anggara, 2014) diartikan sebagai sesuatu untuk memetakan pola keterikatan antarindividu dan antarorganisasi yang bersangkutan.

Suwitri (2008) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara jejaring dalam konteks kebijakan dengan partisipasi. Secara lebih lanjut, dijelaskan bahwa jejaring kebijakan tidak hanya menuntut keterlibatan para *stakeholder* sebagai partisipan, namun juga menuntut pembentukan hubungan yang saling menguntungkan dalam kerangka *good governance*, dimana menyertakan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apabila dominasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah dipegang oleh masyarakat, maka akan terbentuk empat jenis jejaring, meliputi:

- a. *Partisipatory network*, yaitu masyarakat mendominasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat bertindak sebagai agensi;
- b. *Captured network*, yaitu masyarakat mendominasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah dibawah pengaruh satu kelompok masyarakat mayoritas;
- c. *Corporated network*, yaitu masyarakat mendominasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah dibawah pengaruh dua kelompok masyarakat mayoritas;
- d. *Issue Network*, yaitu masyarakat mendominasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah dibawah pengaruh tiga atau lebih kelompok masyarakat mayoritas.

Kadji (2015) menyebutkan bahwa pendekatan jejaring kerjasama dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut :

- a. Kemitraan Strategis yang dijelaskan melalui bentuk subsistem kesetaraan, kerjasama, keterbukaan, dan mutualisme.

- b. Sinergisitas yang menghasilkan hubungan kerjasama internal produktif dan harmonis dengan *stakeholder* lainnya, karya yang bermanfaat yang tampak melalui subsistem aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program atau kegiatan, sumber daya manusia, data dan informasi serta strategi *monev*.
- c. Simbiosis mutualisme yang dimaknai sebagai hubungan antarpihak saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jejaring kebijakan adalah bentuk hubungan atau koordinasi antar aktor dalam proses kebijakan sehingga didapatkan suatu keputusan yang tepat dan dapat menyelesaikan suatu masalah publik dengan baik.

1.5.9. Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklam adalah program yang dilakukan di tingkat lokal dengan lingkup nasional yang diinisiasi oleh KLHK dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat serta aktor berkepentingan lain untuk turut melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Komponen kegiatan Proklam meliputi berbagai upaya yang tergolong sebagai adaptasi, mitigasi serta aspek pendukung keberlanjutan pengendalian perubahan iklim di skala lokal.

Komponen Adaptasi dalam implementasi Proklam meliputi:

- a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
- b. Peningkatan ketahanan pangan

- c. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi
- d. Pengendalian penyakit terkait iklim
- e. Kegiatan- kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

Sementara komponen mitigasi perubahan iklim meliputi:

- a. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
- b. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi
- c. Penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK
- d. Peningkatan tutupan vegetasi
- e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.

Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal ditinjau dari:

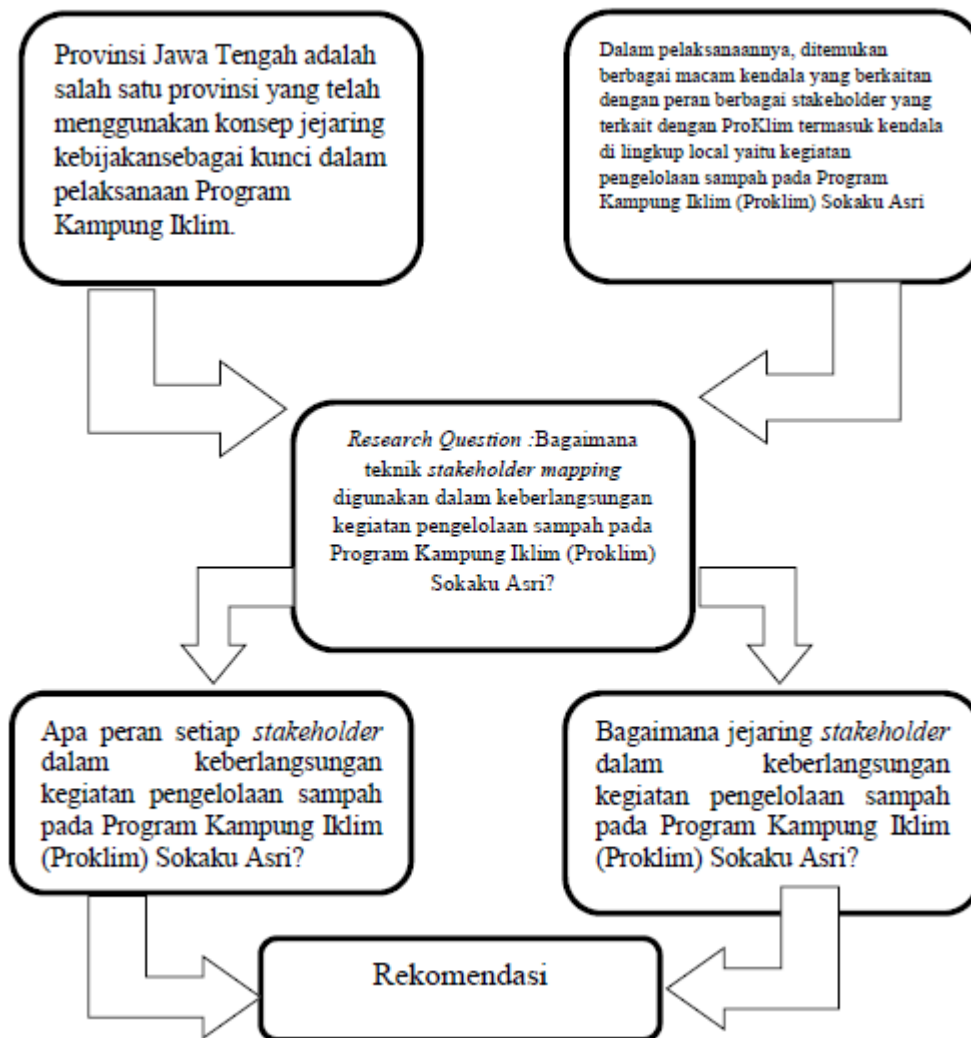
- a. Keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan
- b. Keberadaan dukungan kebijakan
- c. Tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender
- d. Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Proklim

- e. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, LSM, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya
- f. Pengembangan kegiatan ProKlim
- g. Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- h. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

Penjelasan tersebut diatas sekaligus memberikan kesimpulan bahwa proklam adalah program yang diiniasi KLHK sebagai bentuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan potensi di sekitar wilayah setempat, proklam bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk turut berkontribusi pada setiap upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan.

Gambar 1.4.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Analisa penulis

1.6. Operasionalisasi Konsep

Formulasi kebijakan adalah proses dimana para aktor kebijakan publik memiliki intervensi terhadap permasalahan publik serta proses pemilihan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam suatu masalah dan dibuat untuk menyelesaikan masalah publik.

Aktor kebijakan adalah setiap individu atau kelompok yang turut serta dalam perumusan hingga evaluasi suatu kebijakan untuk memberikan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Jejaring kebijakan adalah bentuk hubungan atau koordinasi antar aktor dalam proses kebijakan sehingga didapatkan suatu keputusan yang tepat dan dapat menyelesaikan suatu masalah publik dengan baik.

Analisis *stakeholders* adalah teknik untuk mengidentifikasi dan memberikan nilai dari setiap kepentingan *stakeholders* dalam suatu program. Teknik *net map* merupakan salah satu teknik pemetaan *stakeholders* dalam suatu kebijakan atau program dengan cara menganalisis setiap aktor yang terlibat beserta perannya, kemudian menghubungkan keterkaitan peran antar *stakeholder* serta mengukur tingkat partisipasi aktor tersebut dalam kebijakan terkait.

Proklamasi adalah suatu program pada tingkat lokal yang dilakukan dengan skala nasional. Program ini diinisiasi oleh KLHK sebagai bentuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan potensi di wilayah setempat, proklamasi bertujuan untuk

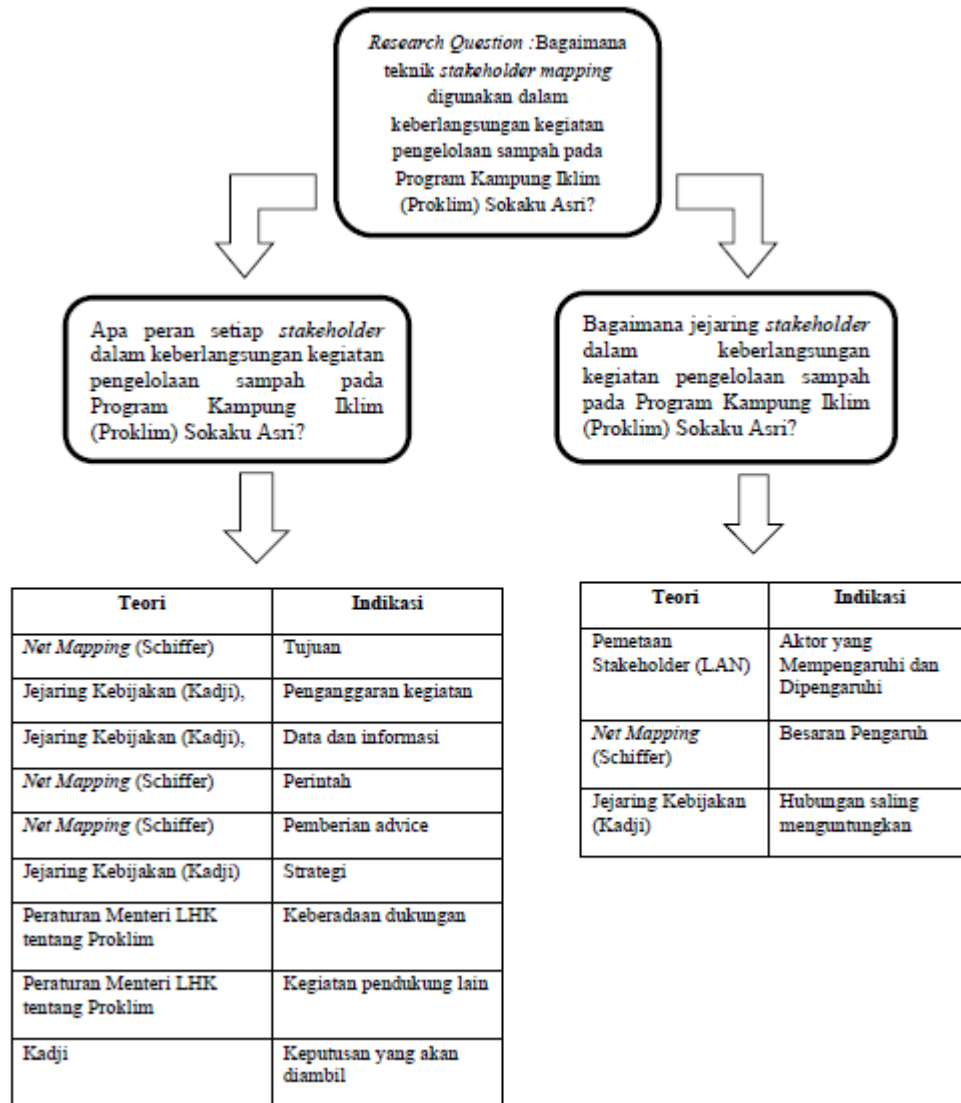
mengurangi dampak perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat dalam berkontribusi pada upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. Pada bagian ini fokus pada tujuan penelitian akan diteliti dengan cara analisis peran setiap *stakeholder* dalam kegiatan pengelolaan sampah Proklim Sokaku Asri. Operasionalisasi berupa rangkaian fenomena yang akan diamati oleh peneliti dalam keberlangsungan Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dusun Soka, Desa Lerep, Kabupaten Semarang.

Tabel 1.5.
Fenomena dan Indikasi

Tujuan Penelitian	Fenomena	Indikasi yang diamati di lapangan
Tujuan 1 : Peran aktor dalam Proklim	Klasifikasi Jenis Aktor	Tujuan Keterlibatan
	Sinergisitas	Penganggaran kegiatan
		Data dan Informasi
		Perintah
		Pemberian <i>advice</i>
	Strategi	
Aspek Pendukung	Keberadaan dukungan	
	Kegiatan pendukung lain	
Ketercapaian Tujuan	Keputusan yang akan diambil	
Tujuan 2 : Jejaring Kebijakan	Pengaruh	Aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi
		Besaran pengaruh
	Kemitraan Strategis	Hubungan antar aktor yang saling menguntungkan

Gambar 1.5.

Bagan Perolehan Indikator



1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014a). Sedangkan Tejoyuwono (dalam

Purwanto, 2011) mendefinisikan metodologi penelitian sebagai ilmu yang berkaitan dengan kerangka kerja pelaksanaan penelitian yang memiliki sistem.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Nugrahani (2014) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan banyak digunakan dalam berbagai bidang studi, terutama dalam bidang budaya, komunikasi, psikologi, pendidikan, serta sosial humaniora. Selain itu, terdapat pula beberapa uraian hasil yang menunjukkan perhitungan angka atau besaran intensitas pengaruh yang diberikan. Namun perhitungan tersebut hanya sebagai penanda jumlah besaran pengaruh yang merupakan hasil atau output dari suatu program dan bukan untuk menunjukkan adanya perhitungan dengan metode kuantitatif.

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan alasan untuk dapat memahami peran setiap aktor yang terkait serta kondisi pemetaan aktor dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim sehingga dapat mengedepankan deskripsi secara rinci dan detail dari potret kondisi sebenarnya Program Kampung Iklim sebagaimana terjadi di lapangan.

1.7.1. Desain Penelitian

Pasolong (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe penelitian yang meliputi:

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menjelaskan hal-hal terkait apa yang terjadi pada saat penelitian tengah dilaksanakan. Seluruh upaya dalam penelitian deskriptif menghasilkan deskripsi, catatan serta interpretasi kondisi yang tengah terjadi, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk memperoleh berbagai informasi terkait keadaan empiris. Penelitian deskriptif hanya menjelaskan informasi secara objektif dan tidak menganalisis hipotesa.

b. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang memiliki sifat terbuka, belum menetapkan hipotesa dan masih mencarinya seiring keberjalanan proses penelitian. Pada penelitian eksploratif, informasi terkait gejala yang ingin diteliti masih cenderung kurang, sehingga penelitian jenis ini sering dilakukan sebagai langkah pertama sebelum memasuki penelitian deskriptif.

c. Penelitian Eksplanatori

Penelitian Eksplanatori dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang menekankan pada hubungan antar berbagai variabel penelitian, serta menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilaksanakan. Maka dari itu, jenis penelitian ini juga sering dinamakan penelitian pengujian hipotesa atau *testing search*.

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan informasi sebagaimana terjadi di lapangan secara objektif.

1.7.2. Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokus Dusun Soka, Desa Lerep, Kabupaten Semarang karena Dusun Soka memiliki berbagai kekurangan dalam hubungan antar aktor yang menyebabkan munculnya kendala pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka, sedangkan fokusnya adalah analisis peran aktor yang memiliki keterlibatan dalam Program Kampung Iklim Sokaku Asri serta bentuk hubungan antar aktor yang dibangun. Fokus mengenai analisis *stakeholders* juga dipilih oleh penulis untuk menunjukkan bahwa aktor pemberdayaan tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat semata, tetapi juga aktor dari klasifikasi lain seperti pemerintah dari berbagai lini, lembaga swadaya masyarakat, sector privat, dan lain sebagainya.

1.7.3. Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek yang digunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling*. Nugrahani (2014) menyebutkan bahwa dalam teknik *purpose sampling*, kriteria penentuan jenis dan jumlah data serta penentuan sumber data perlu dijelaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, teknik *sampling* ini juga sering disebut sebagai *criterion based selection*, atau pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Informan menurut Pongtiku (2017) adalah subjek atau individu yang menjawab berbagai pertanyaan baik secara tulisan mau lisan yang ditanyakan oleh peneliti. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung keberjalanan Program Kampung Iklim Sokaku Asri sebagaimana telah

dinyatakan dalam Strategi Pelaksanaan Proklamasi Jawa Tengah bahwa implementasi program kampung iklim di Jawa Tengah memiliki sinergisitas antar *stakeholders* yang meliputi akademisi, media massa, pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta LSM. Keenam pemangku kepentingan tersebut merupakan informan penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemerintah meliputi Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kepala DLH Kabupaten Semarang dan Kepala Desa Lerep, ketiga lembaga pemerintah tersebut memiliki peran sebagai regulator dan penyusun agenda pada Proklamasi Sokaku Asri.
2. Kelompok masyarakat Dusun Soka karena memiliki peran utama sebagai pelaksana berbagai kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka. Subjek dari kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi ketua Proklamasi Sokaku Asri, direktur Bank Sampah Soka Resik dan Ketua TPS3R Sokaku Asri.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkontribusi sebagai sosialisator dalam keberlangsungan Proklamasi di Kabupaten Semarang meliputi Bintari Foundation.

1.7.4. Jenis Data

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang berisi informasi serta bahan yang tersedia di alam dan harus ditemukan oleh peneliti sehingga terkumpul untuk dipilah Kembali (Subroto, dalam Nugrahani, 2014). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kata tertulis, teks, dan frasa yang mendeskripsikan subjek serta tindakan yang terjadi di lapangan.

1.7.5.Sumber Data

Arikunto (dalam Nugrahani, 2014) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian dengan metode kualitatif, sumber data dapat berupa sumber pustaka yang tertulis, sumber peristiwa, serta seorang individu yang memiliki peran sebagai responden. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer serta data sekunder.

a. Data Primer

Pasolong (2012 : 70) mengartikan data primer sebagai adalah data yang diperoleh peneliti dari objek atau subjek penelitian yang telah ditentukan secara langsung. Data primer juga dapat berupa data sensus yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik secara resmi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian secara langsung meliputi aktor yang berperan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim Sokaku Asri.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai seluruh data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian yang telah ditentukan. Data sekunder juga diartikan sebagai data yang dimiliki oleh suatu kelompok atau organisasi yang bukan pengolah aslinya. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka, dokumen regulasi, serta penelitian terdahulu mengenai topik yang relevan dengan pembahasan mengenai jejaring kebijakan dan Program Kampung Iklim.

1.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Nugrahani (2014) menyatakan bahwa memilih teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yang hendak dikumpulkan oleh peneliti serta sumber data yang tersedia dalam penelitian. Kemudian, berdasarkan sumber data yang tersedia, peneliti dapat memilih teknik pengumpulan data yang sesuai, guna menjawab pertanyaan penelitian yang berangkat dari permasalahan yang hendak diteliti.

Ahmad (2015) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Administrasi Publik* menjelaskan bahwa tujuan penelitian menggambarkan perilaku birokrasi serta jenis data dalam penelitian kualitatif meliputi tindakan, statistik, kata-kata, maupun tulisan. Terdapat 4 teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melalui pengamatan, dokumentasi, wawancara dengan responden, serta studi pustaka.

a. Observasi

Marshall (dalam Sugiyono, 2014: 226) mengemukakan bahwa observasi membuat para peneliti mempelajari kembali tentang perilaku serta setiap makna dari perilaku-perilaku tersebut. Spradley (dalam Sugiyono, 2014: 230) membagi tahapan observasi menjadi 3 (tiga) bagian meliputi tahap deskripsi, reduksi serta seleksi.

b. Wawancara

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014: 232) menyatakan bahwa melalui proses wawancara, peneliti akan mampu mendeskripsikan hal-hal yang bersifat mendetail terkait partisipan dalam menginterpretasikan suatu situasi dan fenomena empiris

sebagaimana terjadi di lapangan, dan hal ini merupakan hasil dari wawancara yang tidak dapat diperoleh pada teknik observasi.

c. Dokumentasi

Nugrahani (2014) menyatakan bahwa peneliti dapat memanfaatkan dokumen atau arsip yang tersedia sebagai sumber data sekunder. Dokumen juga dapat digunakan sebagai alat pelengkap hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dengan para responden sebagai subjek penelitian, observasi tentang tempat dan berlangsungnya peristiwa, hingga aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Nugrahani (2014) menyatakan bahwa peneliti akan diarahkan oleh hasil dari kajian atau studi kepustakaan untuk dapat menentukan masalah yang akan diteliti, serta dapat membentuk suatu kategori yang bersifat substantif berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti. Maka dari itu, membaca sumber pustaka yang relevan menjadi keharusan bagi peneliti sebelum membuat perumusan masalah penelitian.

Suryana (2010) menyatakan bahwa pada kajian atau studi pustaka diperoleh melalui berbagai konsep, pengertian, deskripsi, jenis, faktor, dimensi, indikator, unsur, ciri, langkah, aturan, hukum, perundang-undangan, teori, dalil yang tentunya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan variabel yang telah ditentukan untuk diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang

digunakan penulis pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka.

1.7.6. Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2014: 244) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses dalam pencarian serta penyusunan data yang diperoleh peneliti secara sistematis. Analisis data menghasilkan suatu analisis yang mudah dipahami oleh peneliti, dan kepada orang lain sebagai pihak penerima informasi hasil penelitian. Pada proses analisis data, peneliti melakukan pengorganisasian data, penjabaran pada berbagai unit, penyusunan kepada berbagai pola, pemilihan data yang masih akan digunakan dan tidak digunakan, serta membuat kesimpulan untuk disajikan kepada penerima hasil penelitian.

Spradley (dalam Sugiyono, 2014a) membagi analisis data kepada 4 macam, meliputi :

- 1) Analisis domain: Spradley (dalam Sugiyono, 2014 : 256) menyatakan bahwa analisis domain adalah jenis pertama analisis etnografi. Dalam langkah-langkah selanjutnya kita akan mempertimbangkan analisis taksonomi, yang melibatkan pencarian untuk cara domain budaya diatur, analisis komponen, yang melibatkan pencarian atribut istilah di setiap domain. Akhirnya, kami akan mempertimbangkan analisis tema, yang melibatkan pencarian untuk hubungan antara domain dan bagaimana mereka terkait dengan adegan budaya secara keseluruhan.
- 2) Analisis taksonomi: Analisis taksonomi merupakan analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah diperoleh berdasarkan domain, sehingga peneliti

kemudian menetapkan domain tersebut ditetapkan sebagai *cover term* dan dapat diuraikan dengan lebih mendalam dan lebih rinci.

- 3) Analisis komponensial: Penggunaan analisis komponensial dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat Analisa unsur yang memiliki hubungan dengan sifat kontras pada domain-domain sebagaimana telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Analisis tema kultural: Sanapiah Faisal (dalam Sugiyono, 2014: 264) menyatakan bahwa analisis tema kultural adalah sebuah teknis analisis yang digunakan untuk menemukan benang merah atau pertalian yang akan menghasilkan integrasi lintas domain sebagaimana telah ditentukan sebelumnya.

Jenis analisis yang digunakan oleh penulis adalah tipe analisis komponensial dengan alasan bahwa hasil penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi yang bersifat terfokus.

1.7.7. Kualitas Data

William Wiersma (dalam Sugiyono, 2014: 273) menyatakan bahwa triangulasi merupakan suatu proses validasi silang kualitatif. Proses triangulasi digunakan untuk menilai kecukupan perolehan data yang didapatkan oleh penulis di lapangan dan menilai kesesuaian dengan konvergensi beberapa sumber perolehan data atau beberapa prosedur perolehan data oleh peneliti. Terdapat tiga sumber pada triangulasi data, diantaranya adalah:

- 1) Triangulasi sumber: Triangulasi sumber adalah proses yang digunakan dengan tujuan menguji kredibilitas data dengan cara dengan cara melakukan validasi data

melalui berbagai sumber. Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dan dikategorisasikan, serta tidak dapat dirata-ratakan sebagaimana dilakukan pada penelitian kuantitatif. Maka dari itu, data kemudian diolah berdasarkan pandangan yang sama dan berbeda, serta mana yang spesifik. Hasil Analisis atau pengolahan data tersebut lalu disimpulkan dan dimintai kesepatakan dengan subjek penelitian yang bersangkutan.

2) Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik merupakan upaya untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh peneliti dengan metode pengecekan data kepada subjek penelitian yang sama, namun dengan teknik yang berbeda, dapat berupa wawancara, dokumentasi, atau teknik lainnya.

3) Triangulasi Waktu: Berbeda dengan dua jenis triangulasi sebelumnya, triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, dengan subjek penelitian yang sama. Hal ini disebabkan karena waktu, dalam hal penelitian ini, juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data.

Jenis triangulasi yang digunakan oleh penulis ialah triangulasi sumber, dengan alasan penelitian ini membutuhkan validasi kebenaran data melalui beberapa sumber sehingga akan menghasilkan pernyataan sesuai yang membentuk pola jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Proklamasi Sokaku Asri.